

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

21.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini bertujuan untuk penataan yang terstruktur terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berlandaskan teori yang telah di jelaskan pada beberapa penelitian seperti SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas PEMDA (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal PEMDA Menurut Sujarweni (2015:158). Penerapan SAKD dengan indikator PP No. 71 Tahun 2010 dengan melihat apakah PP tersebut apakah sudah diterapkan dalam instansi atau tidak. Dengan demikian maka, penerapan SAKD dari PP No. 71 Tahun 2010 yaitu dilihat dari kesesuaian dan teori yang berlaku pada penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. “Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat” (Herawati, 2014).

Menurut Halim (2012;35). Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut: “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Penerapan sistem akuntansi daerah sudah mengacu pada PP No 71 tahun 2010;
2. Proses akuntansi di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah. Jika suatu instansi pemerintah memiliki sistem SAKD yang handal diharapkan dengan praktik yang baik, maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di pemerintah daerah.

2.1.1.1 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2012;84) “Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset, dan disempurnakan oleh permendagri” menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer;
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD;

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD;

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer;

Penyajian Laporan Keuangan Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Maka dapat kesimpulan dari beberapa pengertian dan pembahasan yang di teliti dari beberapa teori dari penelitian terdahulu dan beberapa sumber dari buku Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan dari beberapa transaksi-transaksi suatu daerah (Provinsi,Kabupaten,Kota) yang dijadikan sebagai informasi atau acuan untk pengambilan keputusan ekonomi dalam hal pembuatan pelaporan keuangan oleh pihak-pihak intansi lainnya atau pemerintah daerah setempat.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap (perilaku) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi SDM

merupakan karakteristik pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan tugas dan fungsi secara efektif. Semakin kompeten SDM dalam pembuatan laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi sangat berpengaruh dalam hasil pembuatan laporan keuangan, jika karyawan tersebut memiliki kompetensi yang tinggi maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan memenuhi karakteristik kualitatif. Kemampuan pada dasarnya mengacu pada keterampilan dalam mengkoordinasikan sumber daya dan menggunakannya secara produktif. Pada dasarnya, manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Kompetensi dan kinerja SDM menyangkut kewenangan setiap pegawai untuk melaksanakan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi, yang sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya (Torang, 2014:186). Undang-undang nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Agar dapat mengelola kinerja yang efektif, sangat penting mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan kinerja pegawai. Kinerja pegawai mencerminkan perilaku pegawai di tempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi (Kaswan, 2015:152)

Kompetensi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Menurut Ermaya Sumber Daya Manusia, yaitu “Sumber daya manusia adalah faktor utama dan pertama dalam setiap proses pembangunan. Sumber daya manusia di dalam pembangunan memiliki peran ganda yaitu menjadi subjek dan objek dari aktivitas pembangunan yang dijalankan”. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya

Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Karakteristik kompetensi menurut Spencer and Spencer dalam Sutrisno (2009: 225) “karakteristik kompetensi, yaitu: motif, watak, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Salah satu faktor dalam yang membuat LKPD itu berkualitas adalah dari penyusun LKPD itu sendiri adalah sumber daya manusia (SDM). Apabila SDM dari suatu organisasi ataupun instansi tidak berkompeten, maka hasil dari kualitas laporan keuangan daerah yang dikeluarkan akan mengalami penurunan/kurang berkualitas. Namun jika SDM dari suatu organisasi atau instansi itu berkompeten, maka hasil dari laporan keuangan daerah yang dikeluarkan akan baik/berkualitas”.

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu:

1. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.
2. Keterampilan (Skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang pendukung pencapaian tujuan

organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan orang-orang yang berkompeten di bidang ilmu akuntansi. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi memiliki kompetensi di bidang ilmu akuntansi, maka ia akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik, menggunakan pengetahuan dan pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang ditetapkan.

Jadi kesimpulan dari pengertian dan pembahasan teori mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kompetensi sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas dan berkompeten akan berkaitan dengan sumber daya manusia dalam setiap organisasi perangkat daerah pada pemerintah kabupaten atau kota pada setiap provinsi dan dapat di padukan dengan keterampilan dasar, keterampilan baku serta keterampilan mental dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan pada pemerintahan.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mendefinisikan sistem pengendalian intern selanjutnya disingkat SPI sebagai: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang di koordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data

akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Hery (2013:159) Pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut “Pengendalian Internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan, penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Sedangkan menurut IAPI 2011 dalam (Agoes 2012:100), Pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain atas entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. keandalan pelaporan keuangan
- b. efektivitas dan efisiensi operasi, dan
- c. kepatuhan terhadap hukum

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi 2013;163)

Menurut Mulyadi (2013;163), tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Lalu berdasarkan dari beberapa pengertian dan definisi yang tertera antara lain adalah maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

Setelah penjelasan dan pengertian serta faktor-faktor dari pengendalian internal adalah antara lain mempunyai komponen-komponennya yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk

menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (Yadiati, 2010:52). “Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini mengikhtisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan“ (Pura, 2013:11). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan juga bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2012:2). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Halim, 2012:266), tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, sado anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi ketentuan mengenai alokasi sumber daya.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, sehingga harus menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Tanjung, 2014:10). Menurut Tanjung (2014:11)” setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: manajemen, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja”.

2.1.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.4.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu
2. Andal Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat Dipahami

2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu akan diuraikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Table 4.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wati&Hakim (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) • Pengendalian Intern (X2) • Kualitas Laporan Keuangan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan • Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2	Tawaqal&Parno (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Akuntansi (X1) • Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) • Sistem Pengendalian Intern (X3) • Kualitas Laporan Keuangan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh Negative dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan • Kompetensi Sumber daya manusia sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan • Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3	Lina&Haryanto (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) • Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) • Kualitas Laporan Keuangan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan • Kompetensi Sumber daya manusia sangat

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4	Ginta,Lambey& Pontoh (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Intern(X1) • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) • Kualitas Laporan Keuangan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

5	Yati, Sari& Tari (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahK	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) • Sistem Pengendalian Intern (X2) • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Sumber daya manusia sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan • Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
6	Vera, firman, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) • Kualitas Laporan Keuangan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Sumber daya manusia sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan • Sistem Akuntansi Keuangan

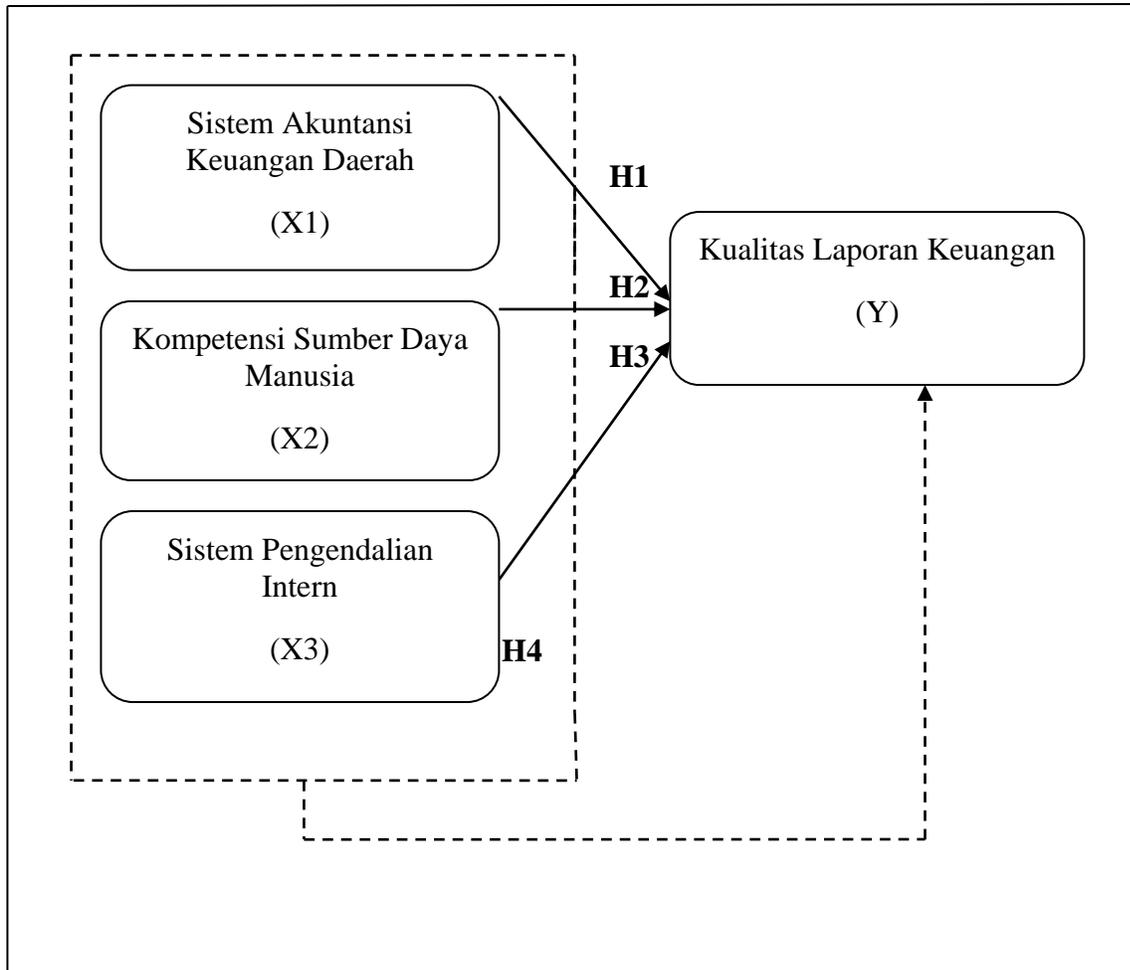
				Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
--	--	--	--	---

Sumber : Penelitian terdahulu

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang di lampirkan diatas dimana pada penelitian ini persamaanya terletak dari variable X dan Y yang telah digunakan. Variable dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, dan Variable independen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan sample penelitian dimana peneliti mengambil objek data pada Pemerintah Kota Palembang, di antaranya waktu penelitian dan jumlah variable penelitian dan penggabungan hasil penelitian lima peneliti pada waktu yang lalu dan lampau sebagai contoh dan objek dari penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang, tinjauan pustaka dan teori-teori penelitian yang telah di jelaskan pada bab terdahulu, maka peneliti akan menguraikan bentuk kerangka piker sebagai berikut:



Sumber : Kerangka Pemikiran 2020

Gambar 4.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan Gambar :

- : Pengaruh variable independen secara parsial terhadap variable dependen
 ----- : Pengaruh variable independen secara simultan terhadap variable dependen

Berdasarkan Gambar Kerangka Pemikiran diatas, dapat di jelaskan variable Independen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi variable dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang baik secara parsial maupun simultan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:68), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”

2.4.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Halim (2012;35) Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut: “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan merumuskan *hipotesis*:

H1: Diduga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

2.4.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap (perilaku) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi SDM merupakan karakteristik pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan tugas dan fungsi secara efektif. Semakin kompeten SDM dalam pembuatan laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan merumuskan *hipotesis*:

H2: Diduga Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

2.4.3 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mendefinisikan sistem pengendalian intern selanjutnya disingkat SPI sebagai: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang di koordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan ofisiensi didalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan merumuskan *hipotesis*:

H3: Diduga Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

2.4.4 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Priyatno:2012).

Dalam hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variable Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Maka hubungan antara variable independen diatas dapat di Hipotesiskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan merumuskan *hipotesis*:

H4: Diduga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang